

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Malak, Stepanus dan Wa Ode Likewati, 2011, *Etnografi Suku Moi*, Sarana Komunikasi Utama, Bogor.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rubaie, H. Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok.
- Sihombing, B.F., 2004, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiharto, Umar Said, Suratman, Noorhudha, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Setara Press, Malang.
- Sumardjono, Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Safitri, Myrna A., Wignjosoebroto, Soetandyo, Nurtjahyo, Lidwina Inge, Andiko, Husein, Taqwaddin, Andriani, Dahniar, Wukak, Piter Bala, 2011, *UNTUK APA PLURALISME HUKUM*, Epistema Institute, Jakarta, HuMa, Jakarta, Forest Peoples Programme, England.
- Syah, Mudakir Iskandar, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Gadjah Mada Univercity Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## TESIS

Yunita, Fitriana Eka, “Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Fitriana, “Peranan Lembaga Adat Malamoi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Suku Moi di Kabupaten Sorong”, *Tesis*, Prodi M.Kn Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

## JURNAL

Rahmadi, Arif, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua”, *Jurnal Tunas Agraria*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Vol.5, No.1, Januari, 2022.

Lubis, Arief Fahmi, “Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat”, *Jurnal ESENSI HUKUM*, Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTM, Vol.3, No.2, Desember 2021.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Bertia Negara Nomor 1127 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Nomor 951 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 280.

Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong. Berita Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2020.